

JURNAL

Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ilmu-ilmu Sosial

- ANALISIS PESAN NASYID PUJI-PUJIAN GROUP RAIHAN
Dessy Trisilowaty
- PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA
Yanita Sarimar M & Bambang Irawan S
- KEBERHASILAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN DEMOKRASI
Nazief Nirwanto
- IMPLEMENTASI PEMBAHARUAN MODEL PENGELOLAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA BERBASIS *BALANCED SCORECARD* GUNA MENINGKATKAN KINERJA PARIWISATA DI KABUPATEN MALANG
Harmono & Abdul Manan
- OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA WISATA BATU MALANG JAWA TIMUR
Kevin Perdana K. & Setia Budi Kurniawan
- PARTISIPATORI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI ALAT PENJERNIH AIR SEDERHANA DENGAN SISTEM FILTRASI
Bekti Prihatiningsih
- PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI TERHADAP MINAT PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI DI KOTA MALANG
Abdul Manap Wardoyo
- ANALISIS HDI INDONESIA: INVESTASI PENDIDIKAN SEBAGAI DAYA SAING BANGSA
Fajar Supanto
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SECARA INTEGRATIF YANG BERBASIS MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TIMUR
Praptining Sukowati

Penerbit



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang
Telp. 0341-581056/568395 Psw. 218 Fax. 0341-581056

JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Vol. XXI

No. 1

Tahun 2010

ISSN: 1410-7295

DEWAN REDAKSI
JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
EDISI ILMU-ILMU SOSIAL

Penanggungjawab:
Ka. LPPM
Universitas Merdeka Malang

Editor

Ir. H. Abd. Rabi', MKom.
H. Fajar Supanto SE, MSi.
Andi Purwanto, SH, MHum.
Ir. Agus Subiyanto, MSc.
Praptining Sukowati, SH, MS.

Dewan Pakar

Prof. Dr. Hj. Djumiati SE, MS.
Prof. Dr. Grahita Chandrarin, Ak, M.Si
Dr. Harmono SE, MSi
Dr. Edi Subyantoro, MSi.

Tata Usaha

Rudi Catur RK, SH.

Alamat Redaksi

Jl. Terusan Raya Dieng 62 Malang

Penerbit:



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

DAFTAR ISI

ANALISIS PESAN NASYID PUJI-PUJIAN GROUP RAIHAN Dessy Trisilowaty	1
PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA Yanita Sarimar M & Bambang Irawan S	17
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN DEMOKRASI Nazief Nirwanto	27
IMPLEMENTASI PEMBAHARUAN MODEL PENGELOLAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA BERBASIS <i>BALANCED SCORECARD</i> GUNA MENINGKATKAN KINERJA PARIWISATA DI KABUPATEN MALANG Harmono & Abdul Manan	41
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA WISATA BATU MALANG JAWA TIMUR Kevin Perdana K. & Setia Budi Kurniawan	60
PARTISIPATORI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI ALAT PENJERNIH AIR SEDERHANA DENGAN SISTEM FILTRASI Bekti Prihatiningsih	71
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI TERHADAP MINAT PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI DI KOTA MALANG Abdul Manap Wardoyo	80
ANALISIS HDI INDONESIA: INVESTASI PENDIDIKAN SEBAGAI DAYA SAING BANGSA Fajar Supanto	91
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SECARA INTEGRATIF YANG BERBASIS MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TIMUR Praptining Sukowati	101

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA WISATA BATU MALANG JAWA TIMUR

Kevin Perdana Kristianto¹

Setia Budi Kurniawan²

Abstraks : Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting di era otonomi daerah. Kemandirian daerah bertolak ukur dari kemampuan daerah untuk menggali semua sumber untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan dirinya. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan tolok ukur pencapaian kemandirian daerah meningkatkan diri di era otonomi daerah. Secara umum kota Wisata Batu masih belum memanfaatkan potensi wilayahnya untuk mencapai optimalisasi pendapatan asli daerahnya di masa berjalannya otonomi daerah dan dimungkinkan di masa ke depan optimalisasi PAD dapat tercapai.

Kata Kunci: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Era Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2001, Pemerintah telah mencanangkan dimulainya sebuah babak baru dalam tata pemerintahan yaitu dengan dijalankannya sistem desentralisasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak sepenuhnya dipegang oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi penyerahan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu untuk diselenggarakan pada tingkat daerah. Dengan memperhatikan daerah memiliki kuasa untuk menggali dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan sendiri. Adapun tujuan pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memberikan kemungkinan bagi daerah yang bersangkutan agar dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga daerah bisa berkembang dan dapat meningkatkan daya guna serta berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, terutama bagi pelayanan kepada masyarakat umum.

Perkembangan dan pertumbuhan kota yang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan-tuntutan dari masyarakat untuk menciptakan manajemen pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mengarah kepada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab (*clean governance*), menuntut Pemerintah Kota Batu untuk menyelenggarakan manajemen pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih akomodatif dan aspiratif serta selaras dan seiring dengan perkembangan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia, secara lebih sederhana dibedakan dalam bentuk pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Pembangunan sektoral merupakan realisasi dari perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan nasional, sedang pembangunan regional merupakan realisasi dari perencanaan pembangunan yang sesuai dengan skala prioritas pembangunan di tingkat daerah otonomi.

Sebagaimana pernyataan tersebut *local accountability* pemerintah daerah terhadap rakyatnya dapat ditingkatkan. Atas dasar itulah prinsip otonomi yang dianut adalah otonomi yang nyata, bertanggung jawab dan dinamis diharapkan dapat lebih mudah direalisasikan. "Nyata" berarti

¹ Kevin Perdana Kristianto, staf keuangan Dispenda Kota Batu - alumni D3 akuntansi Universitas Merdeka Malang

² Setia Budi Kurniawan, dosen fakultas ekonomi Universitas Merdeka Malang

otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah. "Bertanggung jawab" mengandung arti pemberian otonomi diselenggarakan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air dan "dinamis" berarti pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

Untuk menunjang terlaksananya dengan baik pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sudah tentu akan memerlukan dana yang cukup besar agar dapat dan mampu membiayai penyelenggaraan daerahnya. Sebab rasanya mustahil suatu organisasi, terlebih lagi organisasi pemerintah yang skupnya cukup besar dan kompleks dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai daerah yang berotonomi tanpa didukung oleh dana yang memadai. Dengan demikian dana dalam hal ini sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berotonomi, maka sumber pendapatan keuangan daerah yang sangat potensial untuk digali dan dikembangkan oleh masing-masing daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu modal dasar daerah yang berotonomi dalam mendapatkan dana untuk memenuhi belanja daerahnya. PAD juga merupakan usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya dalam memperoleh dana penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, seperti bantuan sumbangan atau subsidi yang lazim disebut dengan Subsidi Daerah Otonom (SDO). Melihat pentingnya posisi keuangan dalam penyelenggaraan otonom daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya, maka masing-masing pemerintah daerah Kota/Kabupaten harus mempunyai sumber-sumber kemampuan keuangan sendiri tanpa harus bergantung sepenuhnya dengan subsidi atau sumbangan dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasnya.

Agar pemerintah daerah memiliki keuangan sendiri seperti yang diharapkan maka pengelolaan sumber-sumber pendapatan keuangan daerah perlu ditingkatkan seoptimal mungkin secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna yang kesemuanya itu diarahkannya pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang sarannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerahnya. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dalam memungut dan menggali sumber-sumber pendapatan keuangan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah serta hasil perusahaan daerah dan lain-lain hasil usaha.

Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis mencoba untuk menarik suatu permasalahan yaitu, apakah Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Kota Batu sudah optimal dalam menghadapi era otonomi daerah.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dioptimalkan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

TINJAUAN PUSTAKA

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi sangat dominan menyusun diberikannya wewenang suatu pemerintah daerah untuk berusaha mengatur

pemerintahannya secara mandiri terlepas dari pemerintah daerah. Selain itu juga dituntut suatu pemerintah daerah mengatur besarnya keuntungan yang ada saat itu.

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari masyarakat atau publik setempat dalam menerima dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembangunan daerahnya. Selain itu dalam program otonomi daerah tugas dari pemerintah daerah sendiri adalah mengelola sumber daya alam semaksimal mungkin guna mengoptimalkan kualitas dan kuantitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatnya.

Sesuai dengan ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan pusat dan daerah. Otonomi nyata adalah keluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Kemudian yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas-tugas dan kewajiban yang dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kewenangan otonomi yang luas adalah keluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu keluasaan otonomi penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlandaskan pada 3 (tiga) hal yang mendasar yaitu : Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan.

Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang mana dijelaskan seperti di bawah ini :

1. Desentralisasi

Adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

3. Tugas pembantuan

Adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah serta pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Sedangkan pengertian otonomi daerah sendiri adalah hak wewenang dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua biaya untuk membiayai pelaksanaan otonomi tersebut diambilkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Namun penulis hanya akan meneliti lingkup Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja.

Dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kota/Kabupaten terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Dari keempat sumber tersebut bisa dikatakan sebagai modal suatu daerah dapat membiayai semua kegiatan pemerintah daerah khususnya setelah otonomi bergulir, karena sebelumnya pemerintah pusat masih campur tangan dalam pemberian subsidi dana untuk pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam kenyataannya sampai saat ini masih belum tercipta struktur APBD seperti apa yang diharapkan. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya menyajikan informasi tentang jumlah sumber pendapatan dan penggunaan dana, sedangkan informasi tentang kinerja yang ingin dicapai, keadaan dan kondisi ekonomi serta potensinya tidak tergambarkan dengan jelas. Informasi tersebut diperlukan sebagai tolok ukur yang harus dijadikan acuan dalam perencanaan anggaran. Karena ketidakjelasan tersebut maka sistem perencanaan anggaran yang digunakan selama ini tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai inisiatif, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat dan potensi sumber daya yang dimilikinya.

Menurut Abdul Halim (2001:45), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) selama periode (satu tahun) serta merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam peningkatan upaya pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Dengan demikian hak-hak masyarakat sebagai konsekuensi kewajibannya seperti membayar pajak, retribusi dan lain-lain dapat dipenuhi dan dilayani secara prima melalui kebijaksanaan ekonomi dan keuangan daerah yang peka terhadap aspirasi masyarakat.

Untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif tersebut, maka APBD yang pada hakekatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada suatu tingkat kinerja tertentu. Artinya APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi-fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat (*Value for money*) dan *public satisfaction* sebagai wujud pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan public (*public accountability*) dapat dicapai.

Dalam proses penentuan proyek-proyek pembangunan, Dinas / Lembaga Propinsi menyusun dan mengajukan perencanaan fisik dan perencanaan pembiayaan proyek yang akan dilaksanakan,

kemudian Bappeda Propinsi mengadakan penelitian tentang proyek berdasarkan skala prioritas. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Penyusunan dan Program mengadakan penelitian jumlah biaya.

Hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Penyusunan dan Program dan Bappeda Kabupaten / Kota, selanjutnya diajukan ke Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian disampaikan kepada DPRD sebagai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), guna pembahasan dan persetujuan DPRD dan ketetapannya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

METODE PENELITIAN

1. Variabel Penelitian

a. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

- 1) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber alam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Belanja Daerah adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari dan juga mempunyai pengeluaran atas barang / jasa yang memberikan manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang meliputi segenap kewenangan pemerintahan.

2. Teknik Analisis Data

Dalam teknis analisis data peneliti menggunakan analisis diskriptif kuantitatif, dimana pada analisis diskriptif kuantitatif melihat berapa besar target anggaran dengan realisasi anggaran dan melihat sejauh mana kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan dan kontribusi PAD dan sumber-sumber PAD

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Batu selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Batu

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Perkembangan (%)
2004	Rp 6.921.533.520,00	Rp 7.072.392.674,96	-
2005	Rp 8.192.582.863,00	Rp 8.415.307.033,78	18,99%
2006	Rp 11.119.524.102,45	Rp 11.050.384.064,30	31,31%
2007	Rp 12.802.148.511,75	Rp 13.283.274.381,07	20,21%

Dari tabel 2 tersebut perkembangan rata-rata Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Batu pertahun selalu meningkat dari tahun-ketahunnya, akan tetapi prosentase perkembangannya menurun pada tahun 2007. Walaupun demikian realisasi PAD selalu melampaui target yang ditetapkan. Kenaikan PAD tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tetap mempertimbangkan prinsip keadilan.

2. Kontribusi Sumber-sumber PAD

Melihat pada komponen PAD Pemerintah Kota Batu masing-masing meliputi 4 komponen, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kontribusi masing-masing komponen terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Pemerintah Kota Batu

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	PAD	Prosentase (%)
2004	Rp 4.464.500.000,00	Rp 4.569.756.363,00	Rp 7.072.392.674,96	64,61%
2005	Rp 4.929.339.000,00	Rp 5.289.255.314,00	Rp 8.415.307.033,78	62,85%
2006	Rp 5.186.276.000,00	Rp 4.969.988.003,00	Rp 11.050.384.064,30	44,98%
2007	Rp 7.105.000.000,00	Rp 5.389.815.393,00	Rp 13.283.274.381,07	40,58%

Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD Pemerintah Kota Batu per tahun selama kurun waktu 4 (empat) tahun adalah 53,25 %. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD menurun setiap tahunnya. Akan tetapi pajak daerah selalu teralisasi dari target yang telah ditetapkan, kecuali pada tahun 2006 dan 2007 yang tidak dapat mencapai dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target tahun 2006 dan 2007 dimungkinkan karena upaya ekstensifikasi dan intensifikasi obyek pajak belum dioptimalkan dan target yang direncanakan masih belum realistis dalam kenyataan di lapangan. Berbagai persoalan menyangkut SDM, sosialisasi, praktik tidak sehat dan sebagainya masih mewarnai upaya peningkatan pajak.

Tabel 4. Kontribusi Retribusi Daerah Pemerintah Kota Batu

Tahun	Target Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	PAD	Prosentase (%)
2004	Rp 1.807.033.520,00	Rp 1.797.043.864,00	Rp 7.072.392.674,96	25,41%
2005	Rp 2.040.409.300,00	Rp 1.969.770.218,00	Rp 8.415.307.033,78	23,41%
2006	Rp 2.514.100.000,00	Rp 2.164.235.250,00	Rp 11.050.384.064,30	19,59%
2007	Rp 2.888.325.000,00	Rp 2.274.211.802,75	Rp 13.283.274.381,07	17,12%

Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Pemerintah Kota Batu per tahun selama kurun waktu 4 tahun hanya berkisar 21,38 %, dan tiap tahunnya tidak pernah tercapai dari target yang telah ditetapkan walaupun tiap tahun targetnya selalu bertambah. Akan tetapi

penerimaan realisasi penerimaan retribusi daerah tidak jauh dari perkiraan target yang telah ditetapkan. Ini diperlukan suatu usaha yang maksimal dari Pemerintah Kota Batu untuk terus meningkatkan sektor PAD dari retribusi daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat setempat. Kualitas pelayanan adalah kunci psikologi mengurangi dampak hilangnya kesempatan masyarakat menggunakan waktunya semakin optimal. Ketidakjelasan sistem dan prosedur membuat banyak masyarakat enggan untuk memanfaatkan peluang dan potensi yang dimiliki Pemkot Batu. Sebuah terobosan kebijakan juga tidak akan berhasil jika kembali kepada SDM yang tidak inovatif dan kreatif. Peningkatan retribusi tidak hanya peran Pemkot tetapi kesadaran masyarakat adalah pemeran utama sebenarnya.

Tabel 5. Kontribusi Laba Usaha Daerah yg Dipisahkan Pemerintah Kota Batu

Tahun	Target Laba Usaha Daerah	Realisasi Laba Usaha Daerah	PAD	Prosentase (%)
2004	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Rp 7.072.392.674,96	2,12%
2005	Rp 175.000.000,00	Rp 520.582.749,54	Rp 8.415.307.033,78	6,19%
2006	Rp 279.148.102,45	Rp 573.913.993,63	Rp 11.050.384.064,30	5,19%
2007	Rp 810.765.005,00	Rp 726.182.500,75	Rp 13.283.274.381,07	5,47%

Rata-rata kontribusi laba usaha daerah terhadap PAD Pemerintah Kota Batu per tahun selama kurun waktu 4 tahun adalah 4,74 %. Laba usaha daerah merupakan hasil-hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan dari masing-masing daerah. Walaupun prosentase laba usaha daerah terhadap PAD sangat kecil, tetapi diharapkan kedepan Pemerintah Kota Batu lebih solid dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada, khususnya juga pada lembaga-lembaga perusahaan milik daerah dikelola secara lebih profesional baik dalam pencapaian kinerja, mutu dan pelayanan maupun akses kebutuhan masyarakat yang harus dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sehingga upaya peningkatan yang berbasis kinerja dapat memberikan output berupa kepercayaan publik, kepuasan konsumen dan peningkatan laba yang bisa menyumbangkan kepada daerah sebagai sumber-sumber dari Penerimaan Asli Daerah. Akan tetapi realisasi yang dicapai dari obyek ini selalu mencapai dan melebihi dari target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2007

Tabel 6. Kontribusi Lain-lain PAD yang sah Pemerintah Kota Batu

Tahun	Target lain-lain PAD yang sah	Realisasi lain-lain PAD yang sah	PAD	Prosentase (%)
2004	Rp 500.000.000,00	Rp 555.592.447,96	Rp 7.072.392.674,96	7,86%
2005	Rp 1.047.834.563,00	Rp 635.698.752,24	Rp 8.415.307.033,78	7,55%
2006	Rp 3.140.000.000,00	Rp 3.342.246.817,67	Rp 11.050.384.064,30	30,25%
2007	Rp 1.998.058.506,00	Rp 4.893.064.684,57	Rp 13.283.274.381,07	36,84%

Rata-rata kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Pemerintah Kota Batu per tahun selama kurun waktu 4 tahun adalah 20,63 %. Kontribusi lain-lain dari PAD yang sah

terhadap PAD ini sangatlah signifikan dengan perkembangan yang begitu drastis, dan tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hanya pada tahun 2005 saja yang tidak memenuhi dari target yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, sumber pembiayaan pemerintahan daerah tergantung pada potensi PAD. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Karena itu Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga dapat memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan skala prioritas kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Untuk rata-rata PAD pada laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Batu selama kurun waktu 4 (empat) tahun mulai tahun 2004 hingga tahun 2007, rata-rata realisasi pendapatan pajak daerah menduduki prosentase paling tinggi yaitu 53,25 %. Sedangkan rata-rata kontribusi Laba Usaha Daerah menduduki urutan paling rendah yaitu sebesar 4,74 % dari PAD.

Untuk tahun-tahun mendatang, diharapkan Pemerintah Kota Batu agar lebih memprioritaskan peningkatan dan pengembangan perusahaan-perusahaan milik daerah, agar lebih memiliki daya saing di lingkungan regional wilayah Jawa Timur dengan seluruh potensi yang ada pada wilayah Kota Batu. Selain itu dapat membuka lapangan pekerjaan dan memaksimalkan potensi masyarakat (usia produktif) di wilayah Kota Batu, sehingga diharapkan dapat menarik pelaku bisnis / investor lainnya.

Secara keseluruhan realisasi penerimaan PAD dapat mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi terdapat beberapa sumber-sumber PAD pada penerimaan yang tidak dapat mencapai target pada masing-masing obyek-obyek PAD. Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari penerimaan daerah yang dapat dipacu dan dikendalikan sendiri oleh daerah, oleh karena itu PAD yang tidak mencapai target hendaknya menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Batu khususnya bagi Satuan Kerja Pendapatan Daerah (SKPD) yang mengelola sumber-sumber PAD. Selanjutnya untuk Tahun Anggaran yang akan datang, Pemerintah Kota Batu agar lebih mengkaji penghitungan potensi Pendapatan Asli Daerahnya dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan atau penggalian Pendapatan Asli Daerahnya.

3. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD

Kontribusi PAD terhadap APBD dapat diukur melalui perbandingan rasio antara PAD : APBD dalam hal seberapa besar PAD dapat mencukupi total belanja daerah untuk tahun 2004 s/d 2007 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2004} = \frac{\text{Rp. 7.072.392.674,96}}{\text{Rp. 158.140.690.046,30}} \times 100 \%$$

$$= 4,47 \%$$

$$\text{Tahun 2005} = \frac{\text{Rp. 8.415.307.033,78}}{\text{Rp. 161.277.810.893,30}} \times 100 \%$$

$$= 5,22 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2006} &= \frac{\text{Rp.11.050.384.064,30}}{\text{Rp.199.815.926.000,38}} \times 100 \% \\ &= 5,53 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2007} &= \frac{\text{Rp.13.283.274.381,07}}{\text{Rp.246.661.476.210,00}} \times 100 \% \\ &= 5,39 \% \end{aligned}$$

Rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD pertahun selama kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebesar 5,15 %.

Dengan melihat data diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah sangatlah sulit karena pendapatan asli daerah belum mencukupi untuk memenuhi pengeluaran yang digunakan untuk pelaksanaan operasional pemerintahan daerah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Batu, bahwa peningkatan pendapatan sektor pajak daerah selama kurun waktu 4 (empat) tahun dari tahun 2004 hingga tahun 2008 memiliki potensi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan pajak daerah sangat mendukung penggalan sumber-sumber PAD, oleh karena itu pajak daerah yang ada harus dapat terus ditingkatkan.

4. Rasio Kemandirian Daerah

Menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi) semakin rendah dan sebaliknya.

$$\text{Rasio (\%)} = \frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2004} &= \frac{\text{Rp.7.072.392.674,96}}{\text{Rp.153.426.252.252,00}} \times 100 \% \\ &= 4,61 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2005} &= \frac{\text{Rp.8.415.307.033,78}}{\text{Rp.143.473.041.136,00}} \times 100 \% \\ &= 5,87 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2006} &= \frac{\text{Rp.11.050.384.064,30}}{\text{Rp.213.231.708.747,00}} \times 100 \% \\ &= 5,18 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2007} &= \frac{\text{Rp.13.283.274.381,07}}{\text{Rp.237.794.671.054,25}} \times 100 \% \\ &= 5,59 \% \end{aligned}$$

Rata-rata ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal pertahun selama kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebesar 5,31 %. Rasio kemandirian daerah Pemerintah Kota Batu masih sangat rendah, dalam hal ini untuk mencukupi kebutuhan atau keeluasaan keuangan daerah yang rata-rata selama kurun waktu 4 (empat) tahun hanyalah 5,31 %. Dalam arti bahwa untuk membiayai kebutuhan dasar maupun kebutuhan yang lain, tergantung kepada dana dari pemerintah pusat. Untuk itu perlu upaya-upaya optimal dalam rangka menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Batu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia yang ada untuk mengimbangi potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis, sehingga seringkali mendatangkan jasa pihak ketiga untuk mendukung program pembangunan Kota Batu sebagai Kota Wisata.
- b. Perbedaan yang mendasar antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetangga setempat dengan melihat pada persiapan sarana dan prasarana yang terlalu luas.
- c. Kurang seimbangny struktur perekonomian daerah
- d. Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada, walaupun sekarang sedang digalakkan program-program peningkatan pembangunan untuk mendukung Visi dan Misi Kota Batu sebagai Kota Wisata.

5. Pengukuran Kinerja Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Batu

PAD yang digunakan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu dana yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan perhitungan realisasi PAD dengan seberapa besar jumlah pengeluaran daerah yang digunakan selama kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja antara PAD dengan realisasi penggunaannya untuk pengeluaran daerah dapat dilakukan dengan cara melakukan pengukuran rasio (perbandingan antara keduanya), yaitu :

$$\text{Rasio (\%)} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pengeluaran Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 7. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Rutin (Belanja Operasional)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pengeluaran rutin (Operasional)	Rasio (%)
2004	Rp 7.072.392.674,96	Rp 123.774.006.039,30	5,71%
2005	Rp 8.415.307.033,78	Rp 124.118.777.523,30	6,78%
2006	Rp 11.050.384.064,30	Rp 156.152.455.219,38	7,08%
2007	Rp 13.283.274.381,07	Rp 164.019.631.340,00	8,10%

Sumber Data : DPPKAD Pemerintah Kota Batu (diolah)

Rata-rata rasio PAD terhadap pengeluaran rutin – belanja operasional per tahun selama kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebesar 6,92 %.

Dari data tabel diatas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir jumlah Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin-belanja operasional daerah menurun dan tidak mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengeluaran daerah. Ketidakmampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin disebabkan karena kurang pengoptimalisasian pada sumber-sumber PAD.

SIMPULAN

Kontribusi rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Batu selama 4 (empat) tahun diketahui masih sangat kecil yaitu 5,15 % atau belum optimal, begitu juga dengan perbandingan kemandirian daerah terhadap sumber dana eksternal yang hanya berkisar 5,31 % juga belum optimal. Bilamana melihat potensi wisata yang dimiliki kota Batu PAD yang dimiliki memungkinkan untuk senantiasa meningkat dan mampu untuk di optimalkan segi pendapatan daerahnya. Salah satu ciri daerah mampu berotonomi adalah mampu memanfaatkan semua potensi wilayah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) seoptimal mungkin.

Rata-rata kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD itu sendiri adalah pajak daerah 53,25 %, retribusi daerah 21,38 %, laba usaha daerah yang dipisahkan 4,74 %, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 20,63 %. Kontribusi sumber-sumber PAD yang besar diperoleh dari sektor pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bakhtiar, Muchlis Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik : Modul Untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kesit, Bambang Prakosa. Juli 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press. Yogyakarta.
- Lembaran Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu
- Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. UUP AMP YJPN. Jogjakarta.
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah*. Aksara Satu. Surabaya.
- Seri Perundang-Undangan RI. 2000. *Bagian IV Tentang Pemerintah Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Wirakrama Waskhitna.
- Sumarni, Murni. 1995. *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Cetakan Pertama Liberty. Yogyakarta.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Edisi Revisi. PT Rineka Cipta Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.